

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subianto, M. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant, PT Menuju Insan Cemerlang.
- Anoraga, A., Wijaya, A. F., & Rengu, S. P. (2014). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program Drive Thru (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 539–545.
- Anshori, A. (2024). Advokasi Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Untuk Revisi Uu Penyiaran di Indonesia: Indonesia. *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI)*, 190-196.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby. (2002). *Managing Policy Reform*. USA: Kumarian Press.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Dawi, K., Wagner, I., Yulastiani, A., Loin, R., & Pratama, E. A. (2021). Problematika Advokasi Kebijakan Publik Oleh Kelompok Masyarakat Sipil Di Kota Pontianak. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 168-188.
- Firdaus, H. N., & Rizka, R. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Menegakkan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 142–159.
- Gede Sandiasa. 2020. Materi Kuliah Komunikasi Advokasi Kebijakan : Pengertian, Proses dan Model Advokasi Kebijakan. Universitas Panji Sakti. Diunduh dari <https://youtu.be/ozGckRnFq50>
- Hayat, H., Malang, U. I., & Pendapatan, P. (2018). *Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284-290.
- Islamy, I. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- John Hopkins University/Center for Communicaton Program. 1999. “A” Frame for Advocacy, JHU/CCP,US. diakses dalam laman

www.jhuccp.org/resource_center/publication.

- Juliasih, L., Hermawan, Y., & Gunawan, A. (2022). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Garut. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 46-58.
- Kalkuhl, M., Milan, B. F., Schwerhoff, G., Jakob, M., Hahnen, M., & Creutzig, F. (2018). Can land taxes foster sustainable development? An assessment of fiscal, distributional and implementation issues. *Land Use Policy*, 78, 338-352.
- Keban, Y. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Kosasi, J., & Barus, A. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 7(2), 119-128.
- LAN. (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponorogo: Calina Media.
- Miles, M.B, Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. USA: Sage Publications.
- Moleong, L. . (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mundayat, A. A., Noerdin, E., & Aripurnama, S. (2006). *Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender*. Jakarta: Women Research Institute.
- Pamungkas, A., Murdiati, S., & Rustianti, O. (2017). Hubungan Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, dan Kualitas Pelayanan Dengan Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 8(2).
- Pamungkas, Y. A., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(1), 57-67.
- Pratomo, H. (2015). *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rahdania, A. F, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta. (2017). Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-6. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15549>

- Rahadian, R. (2020). *Memahami Advokasi Kebijakan Konsep, Teori, dan Praktek Dalam Mewujudkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ritu R., S. (2004). *Pengantar Advokasi: Panduan Latihan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sekaran, Uma dan Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, P. J. (2011). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Victoria Taranu & Griet Verbeeck (2022). *Property tax as a policy against urban sprawl, Land Use Policy*, Volume 122, 106335, ISSN 0264-8377, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106335>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Keputusan Bupati Grobogan Nomor 973/570/2017 tentang Penunjukkan Kepala Desa/Lurah sebagai Petugas Pemungut dan Camat sebagai Koordinator Pengawasan Pemungutan PBB-P2.